

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan sebagai bahan referensi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dengan menambah beberapa unsur pengetahuan dan teori-teori didalamnya. Penelitian terdahulunya adalah sebagai berikut :

Pusporini, (2020) mengangkat tentang analisis pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Pada penelitian ini menggunakan *time series* dengan variabel Pertumbuhan Ekonomi (Y), Belanja Modal (X1) dan Tingkat Inflasi (X2). Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. dari perhitungan tersebut memperoleh hasil variabel belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur.

Ackmadi, (2019) mengangkat tentang pengaruh inflasi, kenaikan upah minimum dan jumlah penduduk terhadap PDRB provinsi banten. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan model *fixed effect* dan memakai variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y) dan variabel inflasi (X1) variabel upah minimum (X2) dan jumlah penduduk (X3). Pada penelitian ini menggunakan analisis data regresi data panel, dari perhitungan tersebut memperoleh hasil nilai variabel inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap PDRB dan pertumbuhan penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Banten.

Siregar, (2019) mengangkat tema analisis pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal terhadap PDRB di Kota Pematangsiantar. Pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X1) Belanja modal (X2) dan Belanja Modal (X3), Dari perhitungan tersebut memperoleh hasil bahwa belanja modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDRB di Kota Pematangsiantar.

Fahmi, (2017) mengangkat tema analisis dampak belanja langsung terhadap perekonomian di Provinsi Jambi. Pada penelitian ini menggunakan data panel dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto (Y), variabel belanja pegawai (X1), belanja barang dan jasa (X2) dan variabel belanja modal (X3). Pada penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda. dari perhitungan tersebut memperoleh seluruh variabel belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB dan secara bersama-sama semua variabel berpengaruh terhadap PDRB di Provinsi Jambi.

Karlina, (2017) mengangkat tema tentang pengaruh tingkat inflasi, indeks harga konsumen terhadap PDB di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan *time series* dengan variabel PDB harga konstan (Y), variabel Inflasi (X1) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) (X2), Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dari perhitungan tersebut memperoleh hasil inflasi berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia.

Hutabarat, (2013) mengangkat tema tentang pengaruh belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Pada penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode *random effect* dan dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi yang di tandai oleh PDRB (Y), variabel belanja pegawai (X1) belanja barang dan jasa (X2), belanja modal (X3) dan jumlah penduduk (X4). Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, dari perhitungan tersebut memperoleh hasil belanja pegawai, belanja barang dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

B. Landasan Teori

2.1 Produk Domestik Regional Bruto

a) Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah pendapatan atau nilai tambah yang di peroleh dari pengelolaan barang dan jasa dari berbagai unit produksi yang berada di wilayah disuatu negara pada kurun waktu satu tahun. Transparasi PDRB dibedakan menjadi dua yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). PDRB atas dasar harga konstan merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan dari barang dan jasa yang mengacu pada harga pasar di tahun yang bersangkutan. fungsi dari PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat kondisi struktur perekonomian. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa secara keseluruhan yang dihitung mengacu pada tingkat harga di tahun dasar. Fungsi PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu di dalam suatu daerah.

Hal yang membuat PDRB digunakan sebagai indikator pertumbuhan adalah :

1. PDRB mencerminkan kondisi faktor produksi yang berada di output produksi barang dan jasa. karena didalam PDRB menggambarkan nilai tambah yang diperoleh dari kegiatan produksi di dalam perekonomian.
2. PDRB menghitung hanya nilai di setiap produk pada tahun bersangkutan. sehingga dapat digunakan untuk membandingkan perubahan yang terjadi.
3. PDRB hanya menyangkut perhidungan daerah regional. sehingga dapat digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan ekonomi yang di tentukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat buat dengan tiga pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Didalam PDRB terdapat Nilai Tambah Bruto (NTB) yang di peroleh dari barang dan jasa dikurangi total biaya yang digunakan dalam proses produksi. Perhitungan ini digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan yang terjadi di suatu negara termasuk di negara berkembang.

Sementara untuk fungsi produksi sendiri adalah menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Q = f(K,L)$$

Dimana :

Q : Jumlah output barang yang dihasilkan

K : Modal

L : Tenaga Kerja

Kemudian, dalam perhitungan pendapatan *output* pada suatu negara perhitungan dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai dari perkalian harga dengan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh produk baik barang dan jasa secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

$$Y = P_1 Q_1 + P_2 Q_2 + \dots + P_n Q_n.$$

Dimana :

Y : Pendapatan

P : *Price* (Harga)

Q : Kuantitas

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan jumlah hasil yang diterima dari faktor produksi yang terdapat didalam proses produksi dalam periode waktu tertentu. pendekatan pendapatan ini diperoleh dari jumlah gaji, sewa tanah, bunga dari modal dan keuntungan belum terpotong yang berasal dari pajak penghasilan dan pajang langsung. Garis besar pendekatan pendapatan di dalam PDRB ini mencakup komponen penyusutan pajak yang tidak langsung netto. Rumus pendekatan pendapatan adalah :

$$Y = Y_w + Y_r + Y_i + Y_p$$

Dimana :

Y : Pendapatan Nasional

W : Upah

r : Sewa

i : Bunga neto

p : Keuntungan

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran ini menunjukkan total keseluruhan jumlah akhir dari produksi barang dan jasa. Perhitungan produksi barang dan jasa ini meliputi konsumsi rumah tangga, swasta murni (tanpa untung), konsumsi pemerintah, investasi, ekspor neto (yang telah dikurangi dengan total impor). Rumus didalam pendekatan pengeluaran ini adalah:

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

Dimana :

Y : Pendapatan nasional

C : Kosumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

Keuntungan yang didapat dari perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah :

1. PDRB ADHB menunjukkan penghasilan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomian satu wilayah
2. PDRB ADHB menunjukkan jumlah penghasilan daerah yang dapat dinikmati oleh penduduk di wilayah yang bersangkutan.
3. PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan tingkat ekonomi dilihat dari sektor-sektor yang memiliki pengaruh besar terhadap kontribusi perekonomian.
4. PDRB ADHB menurut penggunaan menunjukkan seberapa besar kontribusi seluruh sektor baik barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan penjualan ke luar negeri.

5. PDRB ADHK digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dari waktu ke waktu.

b) PDRB Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan suatu negara ditentukan berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang dihasilkan pertumbuhan pendapatan inilah yang kemudian memacu kegiatan perekonomian tumbuh dan memicu barang yang dihasilkan didalam masyarakat bertambah. (Sukirno, 2013) mengemukakan terjadinya pertumbuhan ekonomi karena terdapat perkembangan kegiatan didalam sistem perekonomian itu sendiri yang meliputi naiknya barang dan jasa yang di produksi di dalam masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi menyangkut tentang perubahan kenaikan output ini berupa proses perubahan kondisi perekonomian secara dinamis dari waktu ke waktu, hal yang penting untuk di cermati adalah perkembangan itu sendiri. Didalam pertumbuhan ekonomi indikator yang berfungsi sebagai alat ukur di tingkat daerah adalah PDRB. Didalam PDRB menunjukkan jumlah nilai yang dihasilkan dari total barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh objek ekonomi.

c) Teori – teori tentang pertumbuhan ekonomi

Teori didalam pertumbuhan ekonomi sudah kaji cukup lama oleh para ahli, teori ini secara umum dibedakan menjadi teori klasik dan teori modern, namun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori yang relevan dan bersangkutan terhadap penelitian yang sedang dikaji yaitu teori ekonomi modern dari sudut pandang Keynes. Berikut ini teori mengenai pertumbuhan ekonomi Keynes :

a. Teori Keynes

John Maynard Keynes, pada abad ke-20 ketika terjadi *Great Depression* berpendapat bahwa jika seorang membeli barang untuk dikonsumsi secara individu pada saat kondisi perekonomian normal, maka akan menjadi sumber pendapatan untuk orang lain atau pelaku perekonomian yang sama. Namun, ketika terjadi resesi pelaku ekonomi yaitu masyarakat menahan diri untuk berbelanja

dan cenderung melakukan *saving* atau penyimpanan uang, hal ini membuat terhentinya perputaran uang dan akan mengakibatkan perekonomian lumpuh.

Keynes memberikan solusi dengan memasukkan pihak pemerintah untuk mengontrol perekonomian dengan cara meningkatkan belanja masyarakat. Lalu kemudian, solusi ini di laksanakan pada perang dunia ke-2, di Amerika Serikat sehingga memacu belanja pemerintah dan secara bertahap memulihkan perekonomian negara-negara dan disusul pemulihan perekonomian dunia (Kemenkeu Ditjen Perbendaharaan, 2016).

Sukirno, (2000) yang dikutip dari buku Keynes yang berjudul *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936. Keynes berpendapat permintaan merupakan komponen didalam keberlangsungan kegiatan ekonomi, komponen ini merupakan kegiatan pembelian barang maupun jasa yang diperoleh dari perputaran ekonomi yang mempunyai sifat ketergantungan terhadap pengeluaran agregat. Dalam perekonomian dikatakan memiliki sumberdaya produktif maksimal karena lapangan pekerjaan penuh dan tingkat pengangguran berada di titik normal kondisi ini disebut *full employment*. Kondisi *full employment* ini tidak dengan mudah tercapai dengan pengeluaran agregat, oleh karena itu pemerintah perlu mengetahui pengaruh pengeluaran agregat ini sehingga dalam permasalahan perekonomian dapat diatasi. Didalam pengeluaran agregat terdapat empat komponen utama yang dapat mempengaruhi yaitu intervensi dari pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga, investasi swasta dan ekspor neto.

Apabila disangkutkkan dengan penelitian yang peneliti lakukan, jika dilihat dari sisi permintaan pengeluaran agregat sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi karena pengeluaran pemerintah ini adalah komponen penting didalam

agregat. Keynes mengemukakan persamaan keseimbangan pendapatan nasional yaitu :

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana :

Y = Pendapatan Nasional

I = Investasi

C = Konsumsi Rumah Tangga

G = Pengeluaran Pemerintah (Langsung dan tidak langsung)

NX = Ekspor - Impor

Jika diartikan persamaan diatas tinggi rendahnya pengeluaran pemerintah (G) berpengaruh terhadap laju pendapatan nasional (Y). Keynes berpendapat agar perekonomian tidak berhenti, maka pemerintah harus berusaha dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah (G) lebih besar diatas pendapatan nasional sehingga dapat tercapai kecenderungan pemerintah dalam hal konsumsi (C).

2.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah atau belanja pemerintah merupakan anggaran yang di alokasikan dan berada didalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam skala nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam skala regional/daerah. Pengalokasian anggaran ini setiap tahunnya direncanakan di berbagai sektor dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Menurut (Permendagri No.21 Tahun 2011) menjelaskan belanja daerah mencerminkan hak-hak dan kewajiban didalam pemerintahan. Hak pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah retribusi daerah dan melakukan pinjaman sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sedangkan kewajiban pemerintah daerah dapat dilihat dari rincian belanja pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sebagai pengurangan nilai bersih.

Didalam APBD belanja daerah tersebut dapat diklasifikasikan di berbagai sudut pandang yaitu :

1. Menurut PP No. 71 Tahun 2010 membahas tentang Setandar Akuntansi Pemerintahan. Menerangkan bahwa struktur Standar Akuntansi Pemerintahan didalam penganggaran pemerintah dalam melakukan belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Klasifikasi ekonomi didalam struktur Anggaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
2. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat 2 memberikan rincian klasifikasi berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, fungsi, program kegiatan dan jenis belanja.

- a) Belanja menurut urusan wajib

Didalam Belanja daerah menurut urusan wajib meliputi belanja yang bersifat penting yang berkaitan dengan hak pemerintah daerah dalam menganggarkan kegiatan masyarakat. Belanja menurut urusan wajib meliputi belanja pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

- b) Belanja menurut urusan pilihan

Belanja menurut urusan pilihan mencakup belanja yang di anggarkan pemerintah daerah berdasarkan keunggulan, potensi, dan kondisi daerah yang dimiliki di setiap wilayah. belanja urusan pilihan meliputi belanja pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

- c) Belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, dan jenis belanja.

Pada jenis belanja ini bertujuan agar pengelolaan keuangan negara selaras dengan urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta belanja. Pada pengelolaan belanja ini meliputi :

i. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk melakukan pembayaran gaji baik pokok maupun tunjangan kepada pejabat pemerintah, pejabat daerah, honor, dan kelembagaan yang bertugas sebagai pelaksana kegiatan.

b. Bunga

Digunakan untuk melakukan pembayaran bunga utang daerah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembayaran ini dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*).

c. Subsidi

Digunakan untuk pengalokasian anggaran subsidi yang dibutuhkan masyarakat dengan tujuan mengangkat daya beli masyarakat agar dapat meningkatkan daya beli, memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan.

d. Hibah

Digunakan untuk menganggarkan biaya bantuan dalam bentuk materi atau uang dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemerintah di daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan dalam pembangunan daerah.

e. Bantuan Sosial

Digunakan untuk menganggarkan bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang membutuhkan secara selektif dan adil. Penganggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

f. Belanja Bagi Hasil

Digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah demi melaksanakan konsep desentralisasi. Contoh dalam penyaluran belanja bagi hasil ini adalah. Dana yang bersumber dari pendapatan provinsi kemudian dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota, atau pendapatan kabupaten/kota di bagikan kepada pemerintahan desa. Belanja bagi hasil ini berdasarkan pada peraturan undang-undang.

g. Bantuan Keuangan

Digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus yang diperoleh dari pemerintahan provinsi kepada pemerintahan kabupaten kota, atau dari pemerintahan kabupaten/kota ke pemerintahan desa. Manfaat dari penganggaran ini adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan.

h. Belanja Tak Terduga

Digunakan untuk menganggarkan belanja atau kegiatan yang bersifat mendesak seperti bencana alam atau biaya sosial yang tidak terduga sebelumnya seperti pengembalian dari kelebihan penerimaan darah pada tahun tahun sebelumnya.

ii. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk membiayai gaji pokok maupun tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan kepada anggota dewan, Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintahan desa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), guru honorer, pensiunan dalam bentuk uang maupun barang.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk melakukan pengadaan barang maupun jasa yang digunakan untuk distribusikan atau dijual kepada masyarakat diluar bantuan sosial dan belanja berjalan.

c. Belanja Modal

Digunakan untuk membayarkan dan/atau menambah aset tetap dalam satu periode akuntansi yang ditetapkan pemerintah.

2.3 Teori Kependudukan

Penduduk merupakan setiap orang yang mendiami suatu wilayah dengan kerapatan dan syarat tertentu yang sudah disepakati. Pertumbuhan penduduk merupakan proses perubahan nilai keseluruhan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu.

Pertumbuhan penduduk yang terjadi pada setiap tahunnya berlangsung terus meningkat sebab usia manusia terus tumbuh menjadi dewasa kebutuhan akan regenerasi atau pembaharuan diperhatikan dalam kependudukan. Pembaharuan ini maksudnya adalah pergantian suatu penduduk dengan penduduk baru artinya tingkat kematian harus diimbangi dengan tingkat kelahiran. Apabila tingkat kematian meningkat tanpa ada dorongan angka kelahiran meningkat maka jumlah penduduk akan menurun.

Dampak positif dari pertumbuhan jumlah penduduk adalah dari sektor ekonomi semakin banyak jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah maka tingkat kebutuhan akan barang dan jasa semakin banyak dan diperlukan. Pembangunan suatu tempat usaha di lingkungan padat penduduk akan jadi lebih berkesempatan untuk menghasilkan pendapatan. Kesimpulannya dampak dari pertumbuhan penduduk secara positif adalah dapat meningkatkan kesempatan penduduk dalam memperoleh penghasilan, dampak dari hal ini apabila dilebarkan secara nasional jumlah penduduk dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan pada suatu negara karena dampak dari perputaran ekonomi pada suatu daerah yang berkembang.

Pertumbuhan penduduk dapat juga berpengaruh secara negatif. Pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya menciptakan momok menakutkan dan meluas, sebagai contoh jumlah penduduk meningkat adalah hal yang masih normal, namun apabila jumlah penduduk meningkat

tanpa di imbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup sesuai dengan kebutuhan pasar, maka sebagian penduduk tersebut tidak dapat sejahtera berkepanjangan. Mata pencarian penduduk akan menjadi ancaman apabila jumlah penduduk meningkat tanpa di imbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang menaunginya, sehingga hal ini dapat berakibat naiknya jumlah penduduk namun tidak dibarengi dengan meningkatnya pendapatan pada suatu daerah.

1. Penyebab Pertumbuhan Penduduk

Terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan perubahan jumlah penduduk

- a. Kelahiran merupakan proses melahirkan keturunan atau reproduksi dimana dialami oleh perempuan. Indonesia masa perempuan melahirkan rata-rata di rentan usia 15 tahun hingga 49 tahun.
- b. Kematian merupakan meninggalnya seseorang karena disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu : sakit, terkena bencana alam, perkelahian, kecelakaan dan sebagainya.
- c. Perpindahan merupakan kondisi dimana penduduk disuatu daerah berpindah dari lokasi lama ke lokasi baru karena beberapa faktor pekerjaan, atau merubah kondisi hidupnya, dan faktor-faktor yang lainnya. Adapun didalam migrasi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:
 1. Imigrasi adalah perpindahan penduduk dari luar negeri ke tempat asal.
 2. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari dalam negeri berpindah ke luar negeri.
 3. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk ke pulau-pulau lain yang masih masuk kedalam lingkup suatu negara.
 4. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa menuju ke kota.

C. Hubungan Antara Variabel

1. Hubungan Belanja Pegawai terhadap PDRB

Pengelolaan keuangan daerah diatur dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mengalokasikan belanja pegawai pada pos belanja langsung, fungsi dari anggaran ini adalah untuk penetapan gaji atau tunjangan seluruh pegawai pengelola daerah, dinas-dinas, pegawai negeri, dan lain lain yang menyangkut pengelolaan pemerintah daerah. Secara teoritis terdapat hubungan antara belanja pegawai dengan PDRB karena belanja pegawai merupakan penambahan nilai pendapatan seluruh pegawai di daerah, sehingga hal ini berdampak pada pola konsumsi masyarakat akan meningkat. Peningkatan PDRB secara positif seimbang dengan pola konsumsi masyarakat. Penelitian terdahulu yang menyangkut hubungan belanja pegawai terhadap PDRB yaitu Pusporini, (2020), Fahmi, (2017) dan Hutabarat, (2013). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa belanja pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. Apabila belanja pegawai meningkat maka dapat meningkatkan PDRB.

2. Hubungan Belanja Barang dan Jasa terhadap PDRB

Belanja barang dan jasa merupakan bentuk pengeluaran yang didistribusikan digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dilkungan pemerintahan guna meningkatkan produktifitas non inverstasi guna melancarkan operasional pemerintah. Pengadaan barang dan jasa didalam APBD memiliki peran yang sangat penting hampir sebagian besar belanja pemerintah dilaksanakan dari pengadaan barang dan jasa. sehingga perubahan didalam penganggaran belanja barang dan jasa tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi hal tersebut karena berkaitan dengan operasional dan kelancaran kelembagaan. Penelitian terdahulu yang menyangkut hubungan barang dan jasa terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu Pusporini, (2020), Fahmi, (2017) dan Hutabarat, (2013). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ketika terdapat perubahan nilai realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah hal tersebut berdampak positif terhadap PDRB. Apabila belanja bang dan jasa meningkat maka dapat meningkatkan PDRB.

3. Hubungan Belanja Modal terhadap PDRB

Anggaran dan belanja daerah adalah sebagai bentuk upaya pemerintah dalam pembangunan ekonomi, anggaran didalam APBD merupakan bentuk manifestasi pemerintah dalam mewujudkan pencapaian pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Belanja modal merupakan belanja pemerintah dalam bentuk pembelian perawatan aset supaya dapat digunakan dalam jangka panjang. Penambahan belanja modal akan berakibat penambahan aset pemerintah daerah, peneambahan aset tersebut secara langsung akan meningkatkan pelayanan publik dan juga dapat menambah nilai PDRB di daerah tersebut. Penelitian terdahulu yang menyangkut hubungan barang dan jasa terhadap PDRB yaitu Siregar, (2019) dan Fahmi, (2017). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap PDRB. Apabila belanja modal meningkat maka dapat meningkatkan PDRB.

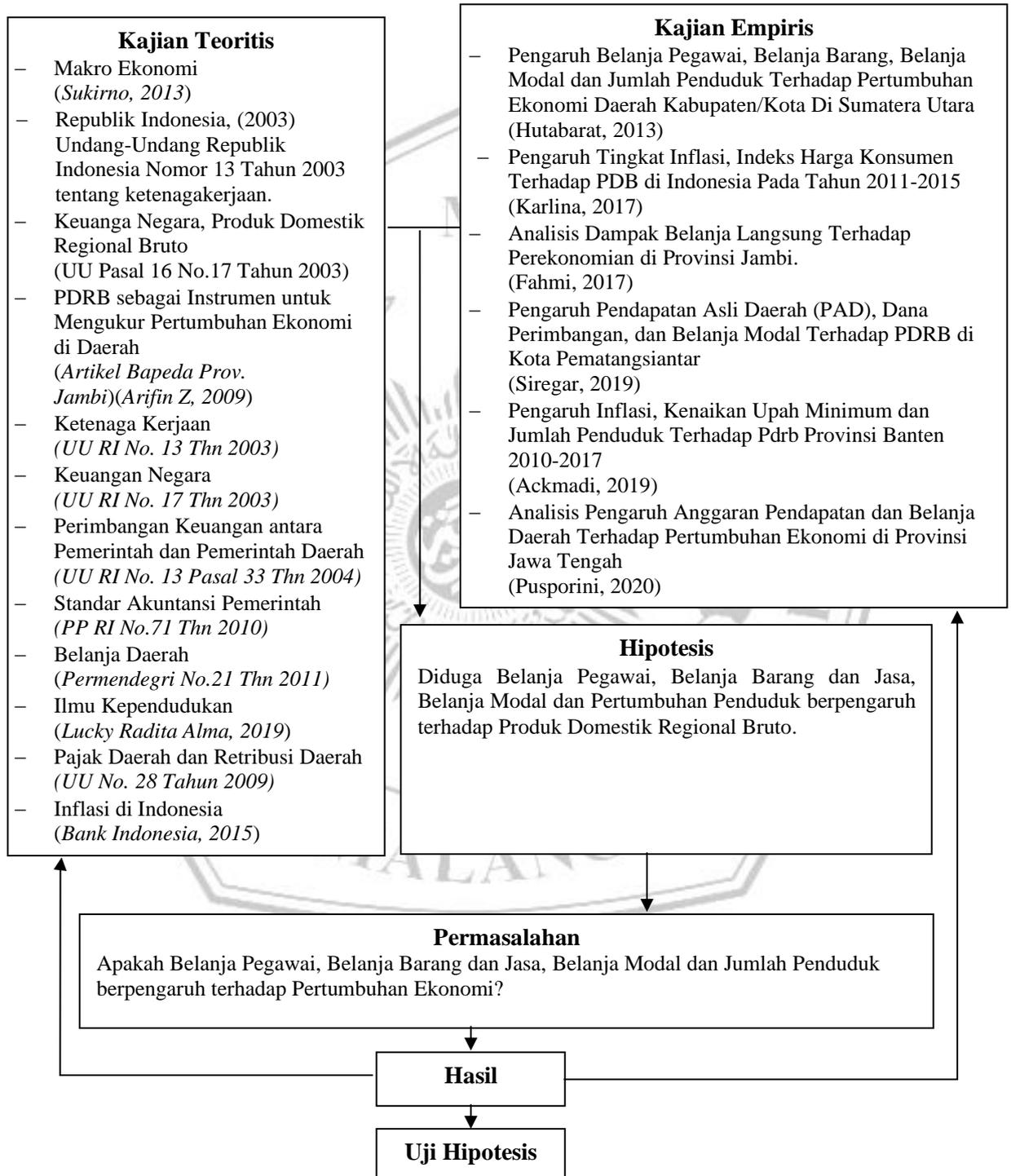
4. Hubungan Jumlah Penduduk terhadap PDRB

jumlah penduduk merupakan pertumbuhan setiap orang yang mendiami suatu wilayah dengan kesepakatan dan syarat tertentu yang sudah disepakati. Pertumbuhan penduduk merupakan proses perubahan nilai keseluruhan jumlah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu, pertumbuhan penduduk dapat berakibat positif dan negatif bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Dampak positif tersebut berupa peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja. Dampak negatif berupa menipisnya kesempatan kerja dan ketika jumlah penduduk banyak tidak di imbangi dengan kualitas penduduk maka terjadi ketidak seimbangan antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan penduduk. Penelitian terdahulu yang menyangkut hubungan Jumlah Penduduk terhadap PDRB yaitu Hutabarat, (2013) dan Ackmadi, (2019) Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara antara jumlah penduduk terhadap PDRB.

D. Kerangka Berfikir

Dari paparan dan penjelasan yang tertera dalam rumusan masalah, penelitian terdahulu dan kajian teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat kerangka berfikir secara teoritis sebagai berikut :

Gambar 1.3 Kerangka Berfikir



E. Perumusan Hipotesis

Dalam membuktikan dugaan kebenaran penelitian ini maka digunakan perumusan hipotesis, hipotesis adalah bentuk jawaban sementara atas rumusan masalah yang disusun berdasarkan kalimat pertanyaan didalam penelitian (Sugiono, 2012). Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

